

B

PERAN NEGARA DALAM KONFLIK PDI

SKRIPSI

KK

Fis. P 178/98

Ana

p.



Disusun Oleh:

Malikah Dwi Ana
NIM. 079213787

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1998

PERAN NEGARA DALAM KONFLIK PDI

SKRIPSI

**Maksud : sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



Disusun Oleh:

**Malikah Dwi Ana
NIM. 079213787**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

PERAN NEGARA DALAM KONFLIK PDI

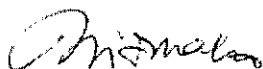
SKRIPSI

**Maksud : sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

Disusun Oleh:

**Malikah Dwi Ana
NIM. 079213787**

Dosen Pembimbing:

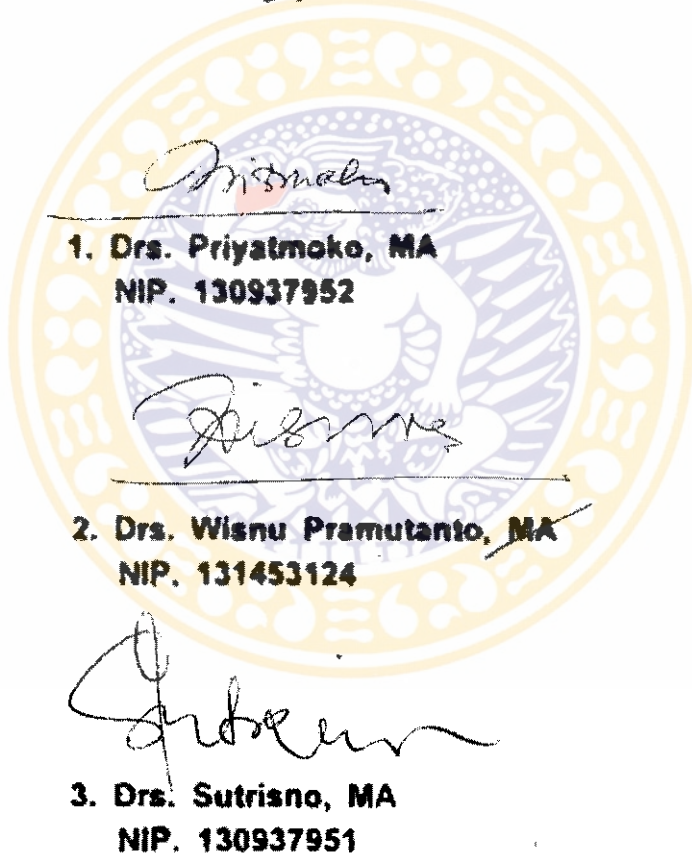


**Dr. Priyatmoko, MA
NIP. 130937952**

PENGESAHAN

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada tanggal 29 Juli 1998.**

Panitia Penguji terdiri dari :



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya dalam masyarakat demokratis, perbedaan dalam sikap dan kedekatan terhadap pemerintah, rekrutmen pimpinan organisasi dan perbedaan cara mencapai tujuan organisasi tidak harus berujung pada konflik. Terciptanya konflik sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan di atas lebih disebabkan oleh ketidak mampuan orpol dalam menengahi perbedaan-perbedaan yang muncul di dalamnya. Ketidak mampuan orpol dalam menangani perbedaan-perbedaan itu telah mengundang masuknya pihak-pihak dari luar (eksternal) organisasi untuk campur tangan. Pihak luar yang dimaksud khususnya negara dalam personifikasinya, yakni ABRI. Campur tangan ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menyebabkan masalah jadi berlarut-larut.

Dari paparan Bab III di atas sekurang-kurangnya ada lima kesimpulan tentang peran negara dalam konflik PDI berikut dalam pengambilalihan kantor DPP PDI tanggal 27 Mei 1996 lalu: *pertama*, dalam catatan sejarah PDI ketika terjadi konflik antara Sanusi-Usep dan Isnaeni-Soenawar (sama-sama dari unsur PNI), negara melalui aparat pemaksa kekuasaannya (melalui Pangkopkamtib Laksamana Sudomo) berusaha menjadi *mediator* bagi kedua kubu yang berkonflik dan hanya melegitimasi DPP PDI Sanusi-Usep.

Yang *kedua* adalah penempatan Soerjadi sebagai Ketua DPP PDI oleh Mendagri Soepardjo Rustam untuk menengahi konflik yang meluas, tidak saja antar elit dan unsur,

tetapi juga antar generasi pada Konggres ke-III PDI. Dan di bawah kepemimpinannya, PDI dalam dua kali Pemilu berhasil menambah 32 kursinya di DPR. Lalu Soerjadi pun di-cap pemerintah ibarat kacang lupa akan kulitnya. Dan pemerintah masuk melalui Dudy-Marsoesi dan Jusuf Merukh merongrong kepemimpinan Soerjadi dengan membentuk DPP tandingan.

Ketiga, sewaktu Konggres PDI IV di Medan *rituh*, pemerintah tidak mengakui Soerjadi yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum PDI, sehingga kemudian melalui Mendagri Rudini membentuk *caretaker* DPP yang dipimpin oleh Latief Pudjosakti melaksanakan KLB PDI di Surabaya.

KLB tersebut memunculkan nama Megawati Soekarnoputri dari kekuatan arus bawah, walaupun kemunculannya mendapatkan banyak tantangan. Diantaranya, polemik tentang keterlibatan ayahandanya, Bung Karno dalam kudeta gagal PKI, terbitnya Buku Putih tentang G 30 S/PKI oleh pemerintah, ketidak kompakn dalam pucuk pimpinan PDI, serta personal elit PDI.

Karena menganggap bahwa kemunculan Megawati itu sebagai 'kecelakaan' politik yang bisa membuat PDI menjadi kekuatan politik yang besar, maka menyebabkan kesimpulan *keempat*, bahwa pemerintah tidak konsekuen dengan azas legalitas, karena pada kenyataannya juga mengakui DPP Tandingan versi Jusuf Merukh untuk menggembosi PDI. Dan pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur dalam kepengurusan DPD PDI Jawa Timur juga sangat mendua, dengan tidak mengakui baik Soetjipto maupun Latief Pudjosakti. Namun pada kenyataannya, Basofi Sudirman memberikan dukungan kepada Latief. Padahal pelantikan Latief oleh Gerry Mbatemoy tersebut tidak sah dan sepilak.